

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam demokrasi yang dianut Indonesia kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Demokrasi yang di anut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. “Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, kalimat yang merupakan sebuah substansi dasar yang harus dimiliki pada sebuah negara dengan paham demokrasi.

Pasang surut perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi fenomena dalam progres menuju Indonesia dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Masalah pokok yang dihadapi ialah beraneka ragam pola budaya masyarakat Indonesia, kemudian mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator itu bersifat perorangan, partai, ataupun militer.¹

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 127.

Pilkada merupakan proses perwujudan dari demokrasi langsung. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah baik berupa pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dari proses pemilihan kepala daerah, yang di atur dalam pasal 56 ayat 1 bahwa *“kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Hal ini juga didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam UU No 10 tahun 2016 dijelaskan tata cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.² Pilihan Terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara

²Lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2

langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Tentu saja, dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri.

Pilkada langsung merupakan mekanisme rekrutmen kepala daerah yang terbingkai dalam suatu sistem.³ Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Demokrasi langsung melalui pilkada akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon di tangan segelintir orang di DPRD.

Dalam Pilkada, tindakan seorang pemilih memberikan suaranya disebut dengan perilaku memilih. Perilaku memilih adalah tindakan atau perilaku seseorang menentukan pilihan atas seorang calon, partai, pendapat atau opini dalam suatu musyawarah atau pemilihan.⁴ Untuk mengetahui bagaimana perilaku

³Joko J. Prihatmoko, *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, hlm.195

⁴Fachri Adnan, 2012, *“Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, UNP Press, hlm.37

memilih individu tersebut berlangsung, ternyata ada banyak faktor yang memiliki hubungan terhadap kecenderungan perilaku memilih individu tersebut. Penekanan penjelasan masing-masing faktor tersebut menyebabkan munculnya mashab-mashab dalam menganalisis perilaku memilih individu.⁵ Ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam perilaku memilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan ekonomi/ rasional.

Pendekatan Sosiologis beranggapan bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor sosiologis yang ada pada lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan sosiologis menekankan kepada faktor-faktor sosiologis dalam menjelaskan perilaku memilih individu seperti aspek lingkungan sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, faktor orang tua, pekerjaan seseorang, tempat tinggal, faktor usia, jenis kelamin dan lain sebagainya.⁶

Aspek lain dalam pendekatan sosiologis ini adalah adanya hubungan pengaruh antara faktor geografis dengan perilaku memilih. Misalnya, kajian Peteron & Rose (1996) di negara Skandavia yang melihat hubungan yang signifikan antara ikatan-ikatan kedaerahan sebagai basis sosial masyarakat dengan kecenderungan mereka melakukan aktivitas politik dan memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik.⁷ Dikaitkan dengan pilkada, pemilih memilih kepala daerah yang berasal dari daerahnya supaya dapat memberikan kemajuan terhadap daerah tempat tinggalnya. Dengan hal yang demikian membuat

⁵Asrinaldi, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 24

⁶Asrinaldi, *Ibid*, Hlm. 25

⁷*Ibid*, Hlm. 28

masyarakat yang berasal dari daerah kandidat untuk memperjuangkan kandidat yang berasal dari daerahnya.

Pendekatan lain yang juga memiliki peranan penting dalam menjelaskan perilaku memilih masyarakat adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini mengidentifikasi perilaku memilih individu dari proses sosialisasi yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refleksi dari kepribadiannya dan menjadi variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik individu tersebut. Karenanya menurut Niemy & Weisberg pendekatan psikologis mengaitkannya dengan tiga aspek utama pendekatan psikologis ini, ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat.⁸

Selanjutnya, pendekatan rasional dikenal juga dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan rasional ini disponsori oleh Anthony Down yang pada mulanya dikembangkan secara teoritis bukan berdasarkan penelitian empiris. Menurut pendekatan ini seseorang memutuskan untuk ikut memilih atau akan memilih calon tertentu didasarkan pada alasan-alasan rasional dan biasanya alasan yang dikemukakan adalah bahwa dengan memberikan suara kepada calon tertentu diharapkan dapat menerima keuntungan atau benefit dari tindakan tersebut. Jadi, menurut teori Down bahwa setiap warga negara (*civics*) membuat keputusan

⁸*ibid*, hlm. 31.

memilih berdasarkan kalkulasi rasional dengan mempertimbangkan janji partai politik pada masa kampanye atau kinerja pemerintah pada masa lalu.⁹

Seiring perkembangan zaman pemilihan kepala daerah mempunyai keunikannya sendiri. Seperti diperbolehkannya narapidana mencalonkan diri atas dasar Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf g yang berbunyi “Tidak Pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 17 calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum, dan lima diantaranya berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Sebanyak lima orang calon berhasil menang dalam pilkada serentak tahun 2015, diantaranya:¹⁰

1. Marten Dira (tersangka KPK) dari Kabupaten Sabu Raijua, Partai pendukung perseorangan
2. Andri Idris syukur dari Kabupaten Barru dengan partai pendukung PKS, Gerindra, Hanura, PPP
3. Gusmal dari Kabupaten Solok, Partai Pendukung Gerindra dan PKS
4. Lakhomizaro Zebua dari kota Gunung Sitoli, Partai pendukung PDIP, Hanura dan PKB
5. Vonny A Panambuan dari Kabupaten Minahasa Utara, Partai pendukung Gerindra

Hadir lima calon tersebut, membuka ruang bagi setiap narapidana untuk kembali melebarkan sayapnya di ranah politik. Kontesasi politik yang berjalan pada saat ini mengalami sebuah dilema, karena secara harfiah politik tidak

⁹ M. Fachri Adnan, *Op.Cit.*, hlm. 47

¹⁰ Satu Harapan.Com , “ICW : 5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Bermasalah” di akses tanggal 27 April 2017 di <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/icw-5-kepala-daerah-hasil-pilkada-serentak-bermasalah>

pernah melarang seseorang untuk berpartisipasi didalamnya, namun secara etika dan norma maka seseorang yang telah pernah dijatuhi hukuman akan sangat tidak efektif jika kembali berkontribusi di kancah politik.

Pilkada secara langsung dilakukan serentak dilaksanakan oleh beberapa daerah di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam pilkada serentak tersebut Sumatera Barat juga melakukannya untuk penggantian gubernur, bupati maupun walikota. Pilkada serentak pada tahun 2015 di Sumatra Barat diikuti oleh sebelas kabupaten, dua kota dan satu pilkada provinsi. Sebanyak 30 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon bupati dan wali kota serta dua pasangan calon gubernur. Salah satunya pilkada dilakukan di Kabupaten Solok untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Pilkada Kabupaten Solok diikuti oleh tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Yaitu pasangan nomor urut satu H. Gusmal, S.E, M.M dengan Yulfadri Nurdin, SH yang diusung dari partai Gerindra dan PKS, kemudian pasangan nomor urut dua Agus Syahdeman,SE dengan Drs. Wahidup yang diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP, dan pasangan nomor urut tiga Drs. H. Desra Ediwan Anantur, MM dengan Bachtul, ST yang diusung partai NasDem, PAN, Partai Hanura. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung
1	H. Gusmal, S.E, M.M dan Yulfadri Nurdin, SH	Partai Gerindra PKS
2	Agus Syahdeman, SE dan Drs. Wahidup	Partai Demokrat PDIP
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, ST	Partai NasDem PAN Partai Hanura

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Solok

Yang menarik dalam pilkada Kabupaten Solok ini adalah bupati terpilih Gusmal salah satu dari lima kepala daerah yang memenangkan pilkada serentak yang berstatus sebagai mantan narapidana. Dan juga Gusmal berhasil memenangkan di sebelas kecamatan dari empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, padahal Gusmal berstatus sebagai mantan narapidana. Dalam pilkada serentak di Kabupaten Solok pasangan nomor urut satu H. Gusmal, S.E, M.M dengan Yulfadri Nurdin, SH mendapat perolehan suara 69.131 atau 46,32%, sedangkan pasangan nomor urut dua Agus Syahdeman, SE dengan Drs. Wahidup mendapat perolehan suara sebanyak 25.375 atau 17,00%, dan pasangan nomor urut tiga Drs. H. Desra Ediwan Anantur, MM dengan Bachtul, ST mendapat perolehan suara 54.732 atau 36,67%. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2: Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2015

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Gusmal, S.E, M.M dan Yulfadri Nurdin, SH	69.131	46,32%
2	Agus Syahdeman, SE dan Drs. Wahidup	25.375	17,00%
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantur, MM dan Bachtul, ST	54.732	36,67%

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Solok

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pasangan nomor urut satu H. Gusmal, S.E, M.M dengan Yulfadri Nurdin, SH memperoleh suara tertinggi dari kedua pasangan lainnya dengan perolehan suara 69.131 atau 46,32%. Hal ini menunjukkan bahwasanya pasangan nomor urut satu H. Gusmal, S.E, M.M dengan Yulfadri Nurdin, SH memenangkan pilkada Kabupaten Solok. Kemenangan

Gusmal dalam pilkada Kabupaten Solok berhasil mengalahkan paslon nomor urut tiga yang merupakan (*incumbent*) yaitu Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, ST. Desra merupakan wakil bupati Kabupaten Solok Pada periode sebelumnya (2010-2015).

H. Gusmal, S.E, M.M adalah bupati terpilih kabupaten Solok untuk periode 2015-2020. Sebenarnya tidak hanya di periode ini saja, pada periode 2005-2010, H. Gusmal, S.E, M.M juga merupakan bupati terpilih kabupaten Solok. Namun pada Pilkada tahun 2010 Gusmal tidak berhasil memenangkan pilkada kabupaten solok karena nama beliau tercoreng dengan isu korupsi yang telah menyebar kemasyarakat.¹¹

Pemerintah Kabupaten Solok di masa kepemimpinan Gusmal pernah meraih tiga penghargaan dari pemerintah pusat pada tahun 2009, yakni Pertama Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM, kedua Penghargaan Perda Bebas Akte Kelahiran, dan Ketiga Penghargaan tertinggi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Satya Lencana Pembangunan tahun 2009. Alasan pemberian penghargaan ini adalah konsistensi Pemerintah Kabupaten Solok dalam memperjuangkan program pro rakyat.¹²

Periode pertama kepemimpinan Gusmal yakni tahun 2005 sampai 2010, tidaklah begitu buruk, sebab dibuktikan dengan tiga penghargaan dari pemerintah pusat. Hal ini merupakan sinergi dari program tiga pilar yang di usung Gusmal pada pemerintahan lima tahun tersebut, ketiga pilar yang dimaksud adalah

¹¹Lihat Skripsi Hendri Yondri yang berjudul Analisis Penyebab Kekalahan Pasangan Petahana (kasus: Gusmal-Edi Erizon) Dalam Pemilu Kada Kabupaten Solok Tahun 2010.

¹²www.kabarindonesia.com, "Empat Tahun Program Tiga Pilar", diakses tanggal 27 April 2017, <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20090902045419>

pendidikan, kesehatan, ekonomi. Artinya prestasi yang dihadirkan Gusmal di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini masih bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pilkada Kabupaten Solok tahun 2015.

Seiring berjalan waktu, makin tinggi kepemimpinan yang dipegang maka makin kuat cobaan yang harus dihadapi seorang pemimpin. Hal ini tidak lepas pula dari cobaan yang dihadapi oleh Gusmal selama menjadi pemimpin. Implikasi yang didapatkan pasca menjadi bupati yakni menjadi narapidana kasus korupsi pengalihan tanah negara bekas *erfpacht verpoding* 173 di Bukit Berkicut, Jorong Sukarami, Kenagarian Koto Gaek Lubuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tahun 2008, seluas 17.750 meter persegi. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 288 juta¹³. Selain Gusmal, lima tersangka lainnya itu di antaranya adalah mantan Kepala BPN Solok Lukman, Ketua Pemeriksa Tanah A/Kasi Hak dan Pendaftaran BPN Solok Husni, dan mantan Kabag Tapem pada Asisten I Setkab Solok Emildolia Khaira. Selain itu, warga jorong Pasar baru Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, yang menjadi perantara Musril Muis, pemilik tanah warga Jorong Balai Oli Nagari Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Anwar, juga ditangkap.¹⁴ Dengan kasus korupsi tersebut Gusmal Mendapat Hukuman 2 Tahun 6 Bulan Penjara.

Berbicara tentang Gusmal, ada sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian. Adalah keterpilihannya kembali menjadi seorang bupati di Kabupaten

¹³Lihat: <http://regional.kompas.com/read/2011/06/29/10451673/Lagi..Mantan.Bupati.Solok.Ditahan.diakses.tanggal.25.juli.2017>

¹⁴*Ibid*

Solok untuk periode 2015-2020. Seperti yang kita tahu bahwa Gusmal adalah mantan narapidana kasus korupsi yang pernah divonis penjara 2 tahun 6 bulan. merupakan prestasi yang cukup bagus bagi Gusmal yang bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Solok tersebut. Dalam pilkada Kabupaten Solok Gusmal berhasil memenangkan 11 Kecamatan Dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



**Tabel 1.3: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada
Kabupaten Solok Tahun 2015**

Kecamatan	DPT	Total Pemilih	Suara Tidak Sah	Tidak Memilih	Hasil Perolehan Suara		
					1	2	3
					H. Gusmal, S.E, M.M dan Yulfadri Nurdin, SH	Agus Syahdem an, SE dan Drs. Wahidup	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, ST
Bukit Sundi	18301	10999	491	7302	5974	1214	3320
Danau Kembar	15905	7402	343	8503	2268	1133	3658
Gunung Talang	36107	23077	816	13030	10386	5153	6500
Hiliran Gumanti	12804	8451	285	4353	3142	640	4411
Ix Koto Sei Lasi	7985	4882	151	3103	2221	1130	1380
Junjung Siri	9127	5259	257	3868	2394	389	2219
Kubung	42205	24836	740	17369	11598	3897	8469
Lembah Gumanti	42622	18974	800	23648	6701	1742	9703
Lembang Jaya	19886	11380	500	8506	5646	2401	2594
Pantai Cermin	15766	8595	434	7171	4268	820	3080
Payung Sekaki	6209	4177	151	2032	2155	802	1069
Tigo Lurah	7606	5048	148	2558	2379	1044	1458
X Koto Diatas	15106	8762	376	6344	3477	1695	3214
X Koto Singkarak	25367	14517	526	10850	6522	3315	3657

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Solok

Dari tabel di atas menunjukkan Gusmal berhasil menang di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. kecamatan yang dimenangkan Gusmal yaitu : Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan IX Koto Sei Lasi, Kecamatan Junjung Siri, Kecamatan Kubung, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan X Koto Singkarak. Sedangkan tiga Kecamatan lainnya dimenangkan Oleh Pasangan nomor urut tiga Desra Ediwan Anantanur-Bachtul. Tiga Kecamatan itu adalah Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Lembah Gumanti.

Gusmal sendiri adalah masyarakat pribumi dari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dari hasil data diatas diketahui bahwa Gusmal memperoleh suara tertinggi di tanah kelahirannya yang hampir dua kali lipat dari pasangan calon lainnya. Artinya masyarakat cenderung memilih pasangan calon yang berasal dari daerahnya sendiri atau keberhasilan di dalam pendekatan sosiologis.

Gusmal merupakan seorang datuak yang diberi gelar Dt. Rajo Lelo oleh kaumnya. Biasanya gelar datuak di minangkabau merupakan pemimpin sebuah suku di minangkabau yang dipercaya oleh kaum dari suku tersebut yang ditunjuk dari anak kemenakan yang ada dalam suku tersebut. Gelar Dt Rajo Lelo yang dimiliki oleh Gusmal merupakan salah satu senjata untuk menyongsong pilkada Kabupaten Solok. Dengan gelar datuak tersebut Gusmal bisa mendapatkan suara dari kaum sukunya karena adanya suatu kedekatan yang terjalin. Begitu pula

pemilih yang berada pada daerah lain yang memiliki kesamaan suku dengan Gusmal bisa jadi memilih Gusmal.

Kemenangan Gusmal dalam pilkada Kabupaten Solok juga tidak lepas dari pengaruh partai pengusung Gusmal. Dalam hal ini Gusmal diusung Oleh Partai Gerindra dan PKS, partai Gerindra ini salah satu partai yang populer pada tahun 2015, dengan jumlah anggota DPRD dari Partai Gerindra di Kabupaten Solok Sebanyak 4 orang, hal ini dapat dilihat sebagian besar masyarakat Kabupaten Solok Memilih anggota legislatif dari partai Gerindra. Selanjutnya PKS yang merupakan partai berideologi islam juga memiliki pengaruh yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Kabupaten Solok cukup kental oleh budaya dan agama islam. Sehingga partai yang berideologi islam cukup mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Solok.

Kampanye merupakan suatu wadah untuk mendapatkan masa dari pemilih. Dalam kampanye Gusmal memiliki slogan insyaallah kita bersama lagi.¹⁵ Slogan tersebut dikarenakan Gusmal pernah menjadi bupati Kabupaten Solok. Saat kampanye, visi Gusmal ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa Adat Basandi Syarak-Syarak-Basandi Kitabullah (ABS-SBK).¹⁶ Adapun turunan dari visi dan misi tersebut adalah empat pilar pembangunan. Empat pilar pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pemerintahan.¹⁷

¹⁵Lihat: <http://www.bhayangkarautama.com/media/?berita=167/kasak-kusuk-pilkada-selesai,-pasangan-gusmal---yulfadri-menang-pilkada-serentak-di-kabupaten-solok>. diakses 25 juli 2017

¹⁶Lihat: <http://www.sumbarsatu.com/Berita/12403-Empat-Pilar-Pembangunan-Harus-Bermuara-Peningkatan-Mutu-Hidup-Masyarakat.html> . diakses 25 juli 2017

¹⁷ *ibid*

Pemerintahan Kabupaten Solok di masa kepemimpinan Gusmal pernah meraih tiga penghargaan dari pemerintah pusat dalam tahun 2009, yakni Pertama Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM, kedua Penghargaan Perda Bebas Akte Kelahiran, dan Ketiga Penghargaan tertinggi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Satya Lencana Pembangunan tahun 2009. Alasan pemberian penghargaan ini adalah konsistensi Pemerintah Kabupaten Solok dalam memperjuangkan program pro rakyat.¹⁸

Berprestasinya Gusmal dalam memimpin Kabupaten Solok pada periode 2005-2010 seperti yang peneliti tulis sebelumnya, yakni dengan adanya tiga penghargaan yang berhasil diraih masih jualan tersendiri oleh Gusmal dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2015 kemaren. Dan hal ini menurut peneliti menjadi acuan tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya pada pilkada Kabupaten Solok tahun 2015

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lebih dalam perilaku memilih masyarakat Kabupaten Solok dalam pilkada serentak tahun 2015 atas kemenangan Gusmal yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Dimana seseorang yang mantan narapidana biasanya membuat kepercayaan seseorang hilang kepadanya. Timbul pertanyaan bagi peneliti: Apa faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih Gusmal pada Pilkada Kabupaten Solok tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁸www.kabarindonesia.com, "Empat Tahun Program Tiga Pilar", diakses tanggal 27 April 1992, <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20090902045419>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih Gusmal pada Pilkada Kabupaten Solok tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan perilaku memilih khususnya perilaku memilih masyarakat dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai perilaku pemilih.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai perilaku memilih masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pasangan kandidat dan tim suksesnya untuk menghadapi Pemilukada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok mendatang

